

**ANALISIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKTOR KELAUTAN DAN
PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh
Antonius Rudi Antoko



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2015**

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF POLICY STRATEGIES OF SEAS AND FISHERIES SECTOR IN LAMPUNG PROVINCE

By

Antonius Rudi Antoko

This research is for strategy analysis and seas and fisheries policy in Lampung Province. This research uses primer data which is from inquiry technique and seconder data which is from seas and Fisheries Official Lampung Province. The analysis of this research is quantity and quality description analysis. The tool of this analysis is SWOT analysis tool. The SWOT analysis tool is useful for counting the quality of each statistical variable of each respondent with the result that quality of each variable. Then it is combined with strength, weakness, opportunity, and threat with the result that strategy priority series with IFAS-EFAS calculation matric way. The result of this produces *Strength-Opportunity (SO)* quality with 4,15 points, *Weakness-Opportunity (WO)* quality 3,57 points, *Strength-Threat (ST)* quality 2,89 points and *Weakness-Threat (WT)* quality with 2,31 points. The combination of IFAS-EFAS produces strategy dan policy with formulation way of each SWOT matric combination. This result can be said that the strength and the opportunity are priority sector which is can be a positive point in developing the building of seas and fisheries sector in Lampung Province

Key words: Strategy, Policy, Strength, Opportunity, Weakness, Threat, SWOT

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Antonius Rudi Antoko

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan kebijakan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari teknik kuisioner dan sekunder yang berasal dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis SWOT. Alat analisis SWOT berguna untuk menghitung bobot tiap-tiap variabel dari setiap responden sehingga dihasilkan bobot masing-masing variabel. Kemudian dikombinasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga dihasilkan urutan prioritas strategi dengan cara perhitungan matriks IFAS-EFAS. Hasil perhitungan ini menghasilkan bobot *Strength-Opportunity (SO)* sebesar 4,15, *Weakness-Opportunity (WO)* sebesar 3,57, *Strength – Threat (ST)* sebesar 2,89 dan *Weakness-Threat (WT)* dengan bobot 2,31. Kombinasi IFAS-EFAS menghasilkan strategi dan kebijakan dengan cara merumuskan tiap-tiap kombinasi matrik SWOT. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan dan peluang merupakan sektor unggulan yang dapat dijadikan nilai positif dalam mengembangkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Strategi, Kebijakan, *Strenght*, *Opportunity*, *Weakness*, *Threat*, SWOT

**ANALISIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKTOR KELAUTAN DAN
PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Antonius Rudi Antoko

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2015**

Judul Skripsi : **ANALISIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKTOR
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Antonius Rudi Antoko**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1111021014**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Marselina Muchtar, S.E., M.P.M.
NIP. 19670710 199003 2 001

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

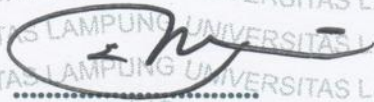
Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 00318

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

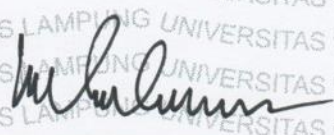
Ketua

: Dr. Marselina Muchtar, S.E., M.P.M.



Penguji

Bukan Pembimbing : M.A. Irsan Dalimunthe, S.E., M.Si.



2. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP. 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 April 2016

PERYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sanksi sesuai peraturan yang berlaku”

Bandar Lampung, April 2016
Penulis



Antonius Rudi Antoko

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Antonius Rudi Antoko lahir pada tanggal 28 Juni 1992 di Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Penulis lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Albertus Karsidi dan Ibu Marsella Suharmurtini.

Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 2 Panutan Kecamatan Pagelaran pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Xaverius Pagelaran dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikannya di SMA Xaverius 1 Palembang dan tamat pada tahun 2010.

Pada tahun 2011 penulis diterima di perguruan tinggi Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tulis pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada semester enam, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bojong, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

MOTO

"Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan"

(Matius 7 : 7-8)

"Setiap keputusan adalah konsekuensi hidup yang harus diterima dan diperjuangkan dengan sepenuh hati."

(Antonius Rudi Antoko)

"Kita semua tahu siapa diri kita, tetapi kita takkan pernah tahu seperti apa kita nantinya"

(William Shakespeare)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Skripsi sederhana ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Albertus Karsidi dan Ibu Marsella Suharmurtini yang selalu menyayangiku dan selalu mendoakan keberhasilanku demi tercapainya cita-citaku.

Kakakku Hieronymus Indra Sepri Andika dan adikku Bernadin Elsavira

Agustin yang telah memberikan dukungan selama ini.

Serta Agatha Tri Ivana Sinta Dewi yang selalu memberi motivasi, dukungan, semangat, dan doanya

Para Dosen yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabarannya.

Semua Sahabat yang begitu tulus menyayangiku.

Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih, cinta-Nya dan segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.

4. Ibu Dr. Marselina, S.E, M.P.M. selaku Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhir kepada penulis.
5. Bapak M.A Irsan Dalimunthe, S.E., M.Si selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan dan staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu kelancaran proses skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu, mas Indra, dek Elsa dan seluruh keluargaku yang selalu mencurahkan doa dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Agatha Tri Ivana Sinta Dewi, terima kasih atas semua doa, dukungan , semangat, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat yang selalu menemani penulis setiap harinya Yogi, Edit, Panggo, Martin, Bella, Yuniarsih, Devri, Piko, yang selalu memberikan semangat.
10. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2011, Asih, Agilta, Gita Novi, Tari, Anggi, Syahid, Mustakim, Dianita, Ade Septiano, Habib, Hamid, Rafiq dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.
11. Teman-teman KKN Desa Bojong, Kecamatan Sekampung Udik: Keluarga besar Desa Bojong, Chairman, Dani, Delsen, Aris, Iche, Debi, dan Devi

yang telah memberikan pengalaman serta kebersamaan yang luar biasa selama masa KKN.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan pengorbanan bapak, ibu, kakak, adik, dan teman-teman. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi penulis berharap semoga karya ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis

Antonius Rudi Antoko

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis	12
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	12
2. Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	13
3. Dasar Hukum APBN	13

4. Postur APBN	14
4.1. Pendapatan dan Hibah	14
4.2. Belanja Negara	15
4.3. Pembiayaan	15
5. Peran dan Fungsi Pemerintah	16
5.1. Fungsi Alokasi	16
5.2. Fungsi Distribusi	18
5.3. Fungsi Stabilisasi	18
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak	20
7. Konsep Kebijakan	20
8. Konsep Strategi	26
9. Konsep Dasar Kelautan	27
10. Konsep Pembangunan Kelautan	28
11. Metode Analisis SWOT	29
B. Penelitian Terdahulu	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Langkah Penggunaan Model	33
B. Analisis SWOT	33
1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal	33
2. Penyusunan Kuisisioner	34
3. Penentuan Bobot	34
4. Perumusan Strategi	36

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Analisis SWOT	39
1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal di Sektor Kelautan	39
2. Penilaian Responden	40
3. Penentuan Strategi	53
4. Strategi dan Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung	58

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Distribusi Sektoral PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2013	4
2. Ditribusi Subsektor Pembentukan PDRB Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2013	5
3. Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2009-2013	7
4. Rumah Tangga Perikanan atau Perusahaan Perikanan (RTPP) Dan Jumlah Nelayan Lampung Tahun 2009-2013	8
5. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Jumlah Pembudidaya Ikan Tahun 2009-2014	9
6. Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
7. Matriks Faktor Internal dan Eksternal	37
8. Matriks SWOT	38
9. Identifikasi Faktor Internal Sektor Kelautan dan Perikanan	39
10. Identifikasi Faktor Eksternal Sektor Kelautan dan Perikanan	40
11. Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Internal	41
12. Hasil Penilaian Responden atas Faktor-Faktor Eksternal ...	42
13. Matriks Interaksi IFAS-EFAS SWOT	54
14. Prioritas Strategi SWOT	57
15. Urutan Prioritas Strategi SWOT	57
16. Strategi Prioritas I : Strategi <i>Strength-Opportunity (SO)</i>	58

17. Strategi Prioritas II : Strategi <i>Weakness-Opportunity (WO)</i> ..	61
18. Strategi Prioritas III : <i>Strategi Strength-Threat (ST)</i>	64
19. Strategi Prioritas IV : <i>Strategi Weakness-Threat (WT)</i>	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pertumbuhan Produksi Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013	6
2. Skema Kerangka Pemikiran	11
3. Kebijakan Publik Pada Masyarakat	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Kuisisioner SWOT	L.1
2. Penilaian Bobot IFAS-EFAS SWOT	L.2
3. Kuisisioner SWOT	L.3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya kelautan Indonesia merupakan salah satu aset pembangunan yang penting dan memiliki peluang sangat besar untuk dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi negara ini. setidaknya terdapat tiga alasan utama yang mendasari hal tersebut. Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas lautan mencapai 3,5 juta km² dan luas daratan 1,9 juta km² dan memiliki garis pantai sepanjang 104.000 km dengan jumlah pulau 17.504 pulau (Kusumastanto, 2014) Kedua, di wilayah pesisir dan lautan yang sangat luas itu terdapat potensi pembangunan berupa aneka sumberdaya alam dan jasa – jasa lingkungan yang belum dimanfaatkan secara optimal (Resosudarmo, 2000). Ketiga, seiring pertambahan jumlah penduduk dunia dan semakin menipisnya sumberdaya pembangunan di daratan, permintaan terhadap produk dan jasa kelautan diperkirakan akan meningkat (Resosudarmo, 2000).

Indonesia dikenal memiliki potensi kelautan dan pesisir yang kaya. Hal ini sesuai dengan sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), yang memiliki 17.504 gugusan pulau-pulau. Potensi sumberdaya pesisir di Indonesia dapat digolongkan sebagai kekayaan alam yang dapat diperbaruhui (*renewable resources*), tidak dapat diperbahurui (*non-renewable resources*), dan berbagai

macam jasa lingkungan (*environmental service*). Kekayaan alam Indonesia tersebut dibuktikan dengan berbagai ragam sumberdaya hayati pesisir yang penting seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan perikanan.

Sektor terpenting di daerah pesisir dan laut adalah sektor perikanan yang merupakan suatu faktor penting karena dengan peningkatan ekspor ikan, sesuai dengan tujuan pembangunan dalam sektor perikanan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pesisir. Di sektor perikanan terkandung kekayaan laut yang sangat beragam, antara lain dari jenis – jenis ikan pelagis (cakalang, tuna, layar) dan jenis ikan demersial (kakap, kerapu). Selain itu, terdapat juga biota lain yang dapat ditemukan di seluruh pesisir di Indonesia, seperti kepiting, udang, teripang, kerang dan lain – lain. Pemanfaatan dan pengelolaan jenis – jenis biota tersebut, kadang – kadang kurang begitu dikenal ataupun dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian nelayan Indonesia dan sebagai salah satu sumberdaya penting yang dapat meningkatkan devisa negara.

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perairan yang luas. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $103^{\circ}40''$ (BT) Bujur Timur sampai $105^{\circ}50''$ (BT) Bujur Timur dan $3^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan sampai $6^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas $35.288,35 \text{ Km}^2$ termasuk 132 pulau disekitarnya. Luas laut yang meliputi jarak 12 mil laut dari garis pantai yang merupakan kewenangan perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan $\pm 24.820 \text{ Km}^2$. panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 Km, yang membentuk empat wilayah pesisir, yaitu

Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270). Luas wilayah Provinsi Lampung tersebut merupakan potensi yang menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, termasuk di dalamnya terkandung keaneragaman hayati dan no hayati bernilai ekonomi tinggi.

Disamping itu terdapat potensi pengembangan untuk (a) perikanan tangkap diperairan umum seluas 17.807 Km² dengan potensi produksi 62.786 ton/tahun, (b) budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, cobia, dan ikan hias), budidaya moluska (kekerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, (c) budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 62.100 ha, (d) budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa), kolam air tawar dan mina padi di sawah, serta (e) bioteknologi perikanan untuk pengembangan produksi dan industri bioteknologi seperti industri bahan baku untuk makanan, industri pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan pangan.

Berdasarkan struktur perekonomiannya, Provinsi Lampung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebesar 36,54%. Selanjutnya adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan rata-rata kontribusi selama kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 15%.

Secara rinci (tahunan) struktur perekonomian Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Distribusi Sektoral PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 (%)

No	Sektor	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	Pertanian/Peternaka/kehutanan/perikanan	38,89	36,82	35,56	35,9	35,54	36,54
2	Pertambangan/penggalan	2,09	1,99	2,09	2,01	2,04	2,05
3	Industri Pengolahan	14,07	15,79	16,07	15,54	15,52	15,4
4	Listrik/Gas/Air Bersih	0,58	0,55	0,54	0,55	0,56	0,56
5	Konstruksi	4,21	3,66	3,44	3,36	3,16	3,56
6	Perdagangan/Hotel/Restoran	13,44	15,25	16,01	15,85	15,94	15,3
7	Transportasi/Komunikasi	9,9	10,16	11,51	11,53	11,76	10,97
8	Keuangan/Persewaan/Jasa Perusahaan	6,67	6,31	5,97	6,15	6,22	6,26
9	Jasa-Jasa	10,15	9,46	8,82	9,1	9,27	9,36
	PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung, 2014

Ditinjau pada masing-masing subsektor pembentuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, subsektor dengan kontribusi terbesar adalah subsektor tanaman bahan makanan (17,65%) dan subsektor perikanan (7,96%). Dengan tingkat kontribusi yang tinggi terhadap PDRB Provinsi Lampung, subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perikanan jelas merupakan sektor strategis

dan sangat potensial dalam perkembangan perekonomian Provinsi Lampung di masa mendatang.

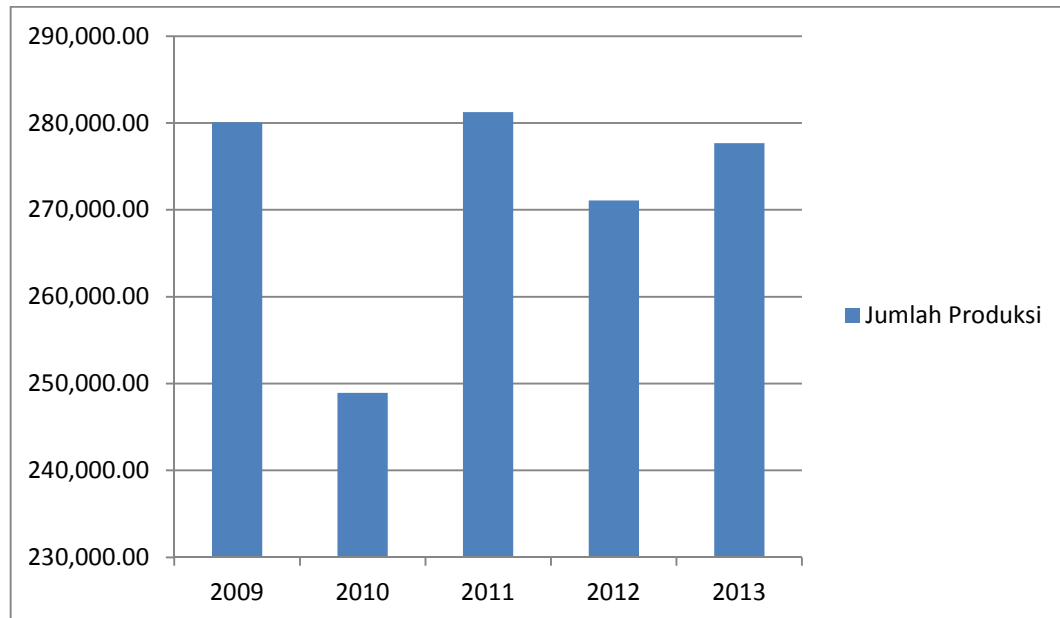
Tabel 2. Distribusi Subsektor Pembentukan PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 (%)

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
Pertanian/Peternakan/ Kehutanan/Perikanan	38,89	36,82	35,56	35,9	35,54	36,54
a) Tanaman Bahan Makanan	17	16,93	17,33	18,23	18,76	17,65
b) Tanaman Perkebunan	7,34	6,46	6,26	5,9	5,72	6,34
c) Peternakan dan hasil lainnya	4,68	3,78	4,01	3,94	4,1	4,1
d) Kehutanan	0,55	0,5	0,47	0,47	0,48	0,49
e) Perikanan	9,32	9,16	7,49	7,37	6,47	7,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Lampung, 2014

Tingkat kontribusi dan pertumbuhan subsektor perikanan ditujukan dengan perkembangan produksi perikanan di Provinsi Lampung. Sumber produksi perikanan Lampung berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap selama lima tahun terakhir, 2009-2013, tingkat produksinya mengalami fluktuasi dengan peningkatan hanya sekitar 0,17% pertahun.

Gambar 1. Pertumbuhan Produksi Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 (ton)



Sumber : LDA BPS Lampung, 2010-2014

Produksi perikanan dari perikanan tangkap didominasi oleh ikan hasil tangkapan perikanan laut atau 96,63 % dari perairan umum. Tingkat produksi perikanan tangkap yang terbesar adalah jenis ikan cakalang (tongkol) rata-rata mencapai lebih dari 8000 ton pertahun. Udang rata-rata juga lebih dari 8000 ton pertahun, dan tuna sebesar 1.200 ton lebih. Sedangkan produksi perikanan tangkap-perairan umum pada periode yang sama adalah jenis ikan rata-rata 9.300 ton lebih, udang 155,25 ton, dan lainnya sekitar 9 ton.

Tabel 3. Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 (ton)

Jenis	2009	2010	2011	2012	2013
Produksi Perikanan tangkap (Laut)	164.552	143.813	154.484	144.485	163.107
Produksi perikanan tangkap (Perairan Umum)	8.532	7.036	7.524	5.587	6.254
Jumlah	173.084	150.849	162.008	150.342	169.361

Sumber : LDA BPS Lampung, 2010-2014

Provinsi Lampung memiliki garis pantai sepanjang ± 1.105 dan luas wilayah perairan pesisir $\pm 24.820 \text{ Km}^2$. Dengan potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, maka banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada subsektor tersebut. Rumah tangga perikanan adalah rumah tangga yang mata pencahariannya dan jenis kegiatan usahanya bergerak pada subsektor perikanan. Rumah tangga perikanan terbagi dalam beberapa jenis, yaitu RTPP Perikanan budidaya, RTPP Pembudidaya, RTPP nelayan perikanan laut, RTPP nelayan perairan umum. RTPP pembudidaya adalah RTPP dengan jumlah terbanyak, sedangkan RTPP nelayan perairan umum adalah RTPP dengan jumlah paling sedikit. Nelayan perairan laut pada tahun 2009 sebanyak 43.415 orang, pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan hingga akhir tahun 2013 tinggal 37.424 orang, atau mengalami penurunan sekitar 4,21%. Sedangkan nelayan di perairan umum mengalami kenaikan sekitar 2,79%, yaitu tahun 2009 sebanyak 3.599 orang pada tahun 2013 menjadi 3.958 orang. Kondisi RTPP perikanan tangkap dan nelayan di Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rumah Tangga Perikanan/Perusahaan Perikanan (RTPP) dan Jumlah Nelayan Lampung Tahun 2009-2013

Tahun	RTP/P Perikanan Tangkap (unit)		Nelayan (Orang)	
	Perairan Laut	Perairan Umum	Perairan Laut	Perairan Umum
2009	9.531	6.061	43.243	3.599
2010	8.773	6.459	38.621	3.781
2011	7.688	7.418	36.596	4.310
2012	7.466	6.172	36.465	3.949
2013	7.611	6.533	37.424	3.968
%	-5,32	2,62	-4,21	2,79

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2014

Sementara itu jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdadakan) pada tahun 2009 sebanyak 3.899 Pokdakan, dan hingga menjelang akhir tahun 2014 jumlah menurun sekitar 2.510 Pokdakan. Selama kurun waktu 2009-2014 jumlah pokdakan mengalami tren negatif yaitu -5,64% per tahun. Sedangkan jumlah pembudidaya ikan pada dua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2013 jumlah pembudidaya ikan turun hingga 75,37% dan tahun 2014 juga diperkirakan turun sekitar 28,91%.

Tabel 5. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Jumlah Pembudidaya Ikan Tahun 2009-2014

Tahun	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Pembudidaya Ikan (Orang)
2009	3.899	81.641
2010	3.940	114.876
2011	4.262	91.117
2012	5.321	191.562
2013	3.932	47.183
2014	2.510	33.544
%	-5,64	5,2

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2014

Mencermati potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Lampung yang begitu besar, maka tantangan lain yang timbul adalah maraknya kegiatan *illegal fishing* oleh kapal-kapal ikan dari luar daerah dan kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan provinsi dan ZEE. Hal ini sebagai akibat dari tuntutan industri perikanan negara tetangga yang harus bertahan. Disisi lain *fishing ground* negara tetangga makin habis sedangkan permintaan industri ikan dunia yang meningkat, dan perairan Indonesia dibiarkan terbuka karena terbatasnya pengawasan di lautan. Kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bagian integral dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan dengan sarana dan prasarana pengawasan, SDM pengawasan, regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah serta dukungan internasional yang kuat untuk menanggulangi *illegal fishing* yang juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha nelayan tradisional.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dapat diidentifikasi sebagai faktor kekuatan dan faktor kelemahan utama, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang berpengaruh terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan provinsi Lampung?
2. Prioritas strategi kebijakan apa yang secara tepat harus diambil oleh pemerintah provinsi Lampung untuk melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan?

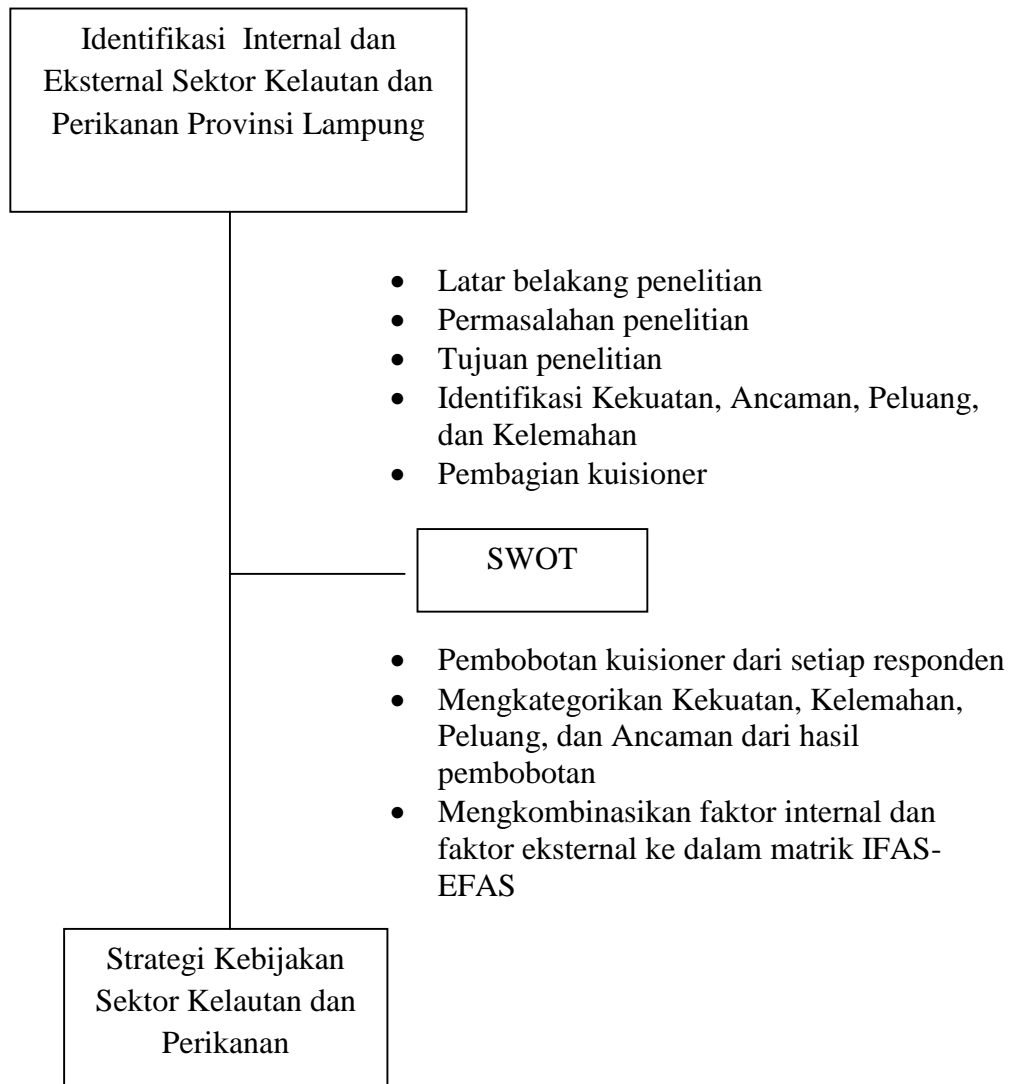
C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan provinsi Lampung baik dari faktor internal maupun faktor eksternal berupa kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) maupun ancaman (*threat*).
2. Merumuskan strategi sektor kelautan dan perikanan provinsi Lampung berdasarkan SWOT.
3. Memilih prioritas kebijakan berdasarkan strategi SWOT.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan dasar pengetahuan umum sisi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia, khususnya potensi kelautan dan perikanan Lampung.
2. Sebagai bahan kajian untuk pengetahuan potensi sektor kelautan dan perikanan Lampung.
3. Sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk digunakan pemerintah dalam membuat kebijakan di sektor kelautan dan perikanan.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN adalah undang – undang, sehingga merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang – Undang Dasar 1945 yaitu : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, sesuai 26 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setelah APBN ditetapkan dengan undang – undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (DepKeu, 2014).

2. Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target – target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian (DepKeu, 2014).

3. Dasar Hukum APBN

Undang – Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang – undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang – undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Dalam bab tersebut khususnya pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bunyi pasal 23:

Ayat 1 : “Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat’.

Ayat 2 : “Rancangan undang – undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah”. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah bersama – sama DPR menyusun Rancangan Undang – Undang APBN untuk nantinya ditetapkan, sehingga akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengelola APBN dan bagi DPR sebagai alat pengawasan.

Ayat 3: “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu”. Hal ini dipertegas lagi dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 15 ayat 6 yang berbunyi “Apabila DPR tidak menyetujui RUU sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi – tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran sebelumnya” (DepKeu, 2014)

4. Postur APBN

Tiga kelompok besar komponen yang membentuk postur APBN terdiri dari (DepKeu, 2014) :

4.1 Pendapatan dan hibah

Pendapatan Negara dan Hibah merupakan semua penerimaan negara dalam satu tahun anggaran yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak perlu dibayar kembali oleh Negara. Besarnya pendapatan negara dan hibah terutama dipengaruhi oleh proyeksi perkembangan ekonomi nasional dan internasional yang tercermin pada asumsi dasar ekonomi, perkembangan realisasi tahun – tahun

sebelumnya, serta kebijakan pemerintah di bidang pendapatan Negara dan hibah. Pendapatan ini terdiri penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan negara terbesar, dengan menyumbang sekitar 99,7% dari total penerimaan negara. Hal ini terkait kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dalam negeri agar dapat mendukung kebijakan konsolidasi fiskal yang berkelanjutan. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama dengan proporsi sekitar 69-70% dari total penerimaan dalam negeri. Selain dari perpajakan, sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pengelolaan PNBP didasarkan pada ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997, yang pada pasal 5 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DepKeu, 2014).

4.2 Belanja Negara

Belanja Negara merupakan semua pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh negara.

4.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan semua penerimaan negara dalam tahun tertentu yang harus dibayar kembali / pengeluaran Negara dalam tahun tertentu yang akan diterima kembali. Pembayaran kembali atau penerimaan kembali tersebut dapat terjadi baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

5. Peran dan Fungsi Pemerintah

Fungsi pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat (Thoha, 1991). Dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, tugas pelayanan lebih menekankan upaya kekuasaan *power* yang melekat pada jabatan birokrasi. Selain itu, pemikiran 2 tokoh, John Lock dan Montesquie yang membahas mengenai *Trias politica*, fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif dipaparkan sebagai *Chief of State, Head of Government, Party Chief, Commander in Chief, dan Chief Legislation*. Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000 : 13) yang memaparkan enam tugas umum pemerintah antara lain menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan, memelihara ketertiban dan menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, dan menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan. Berdasarkan pendapat Bintoro Tjokroamidjojo (Bintoro Tjokroamidjojo, 1984), maka fungsi dan peran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

5.1 Fungsi Alokasi

Peranan alokasi oleh pemerintah ini sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta yaitu barang-

barang umum atau disebut juga barang publik. Karena dalam sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Dalam hal seperti ini maka pemerintah harus bias menyediakan apa yang disebut barang publik.

Tidak dapat tersedianya barang publik tersebut melalui sistem pasar disebut dengan kegagalan pasar. Hal ini dikarenakan manfaat dari barang tersebut tidak dapat dinikmati hanya oleh yang memiliki sendiri, tapi dapat dimiliki atau dinikmati oleh orang lain, dengan kata lain, barang tersebut tidak mempunyai sifat pengecualian seperti halnya barang swasta. Contohnya seperti udara bersih, jalan umum, jembatan dan sebagainya.

Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memuaskan/memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat yang secara efektif tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar. Contohnya dalam kegiatan pendidikan, pertahanan, keamanan, dan keadilan.

Sedangkan kaitannya dengan kelautan peran alokasi memiliki fungsi regulasi, yang mana peran regulasi berguna untuk membagi sumberdaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah bagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang pengelolaan kelautan menjamin setiap warga negara khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan ataupun usaha kelautan memperoleh hak dan kewajiban dalam mengelolah hasil laut.

5.2 Fungsi Distribusi

Dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan didistribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi dan beberapa faktor-faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, negara juga dapat ikut serta dalam mekanisme pasar melalui pemberian subsidi, control terhadap harga, dan pengenaan pajak pada barang mewah.

Fungsi ataupun peran distribusi dari pemerintah bagi masyarakat publik khususnya dibidang kelautan memiliki peran yang sangat penting. Peran distribusi dijalankan oleh pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul oleh setiap orang, disamping adanya keberpihakan pemerintah kepada yang tersisih atau lebih lemah. Peran pemerintah ini sangat penting karena sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang notabene adalah masyarakat yang terpinggirkan dan hal inilah yang mengakibatkan sebagian nelayan di Indonesia hidup dalam kemiskinan. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan yang berorientasi dalam pengentasan kemiskinan nelayan.

5.3 Fungsi Stabilisasi

Kegiatan menstabilisasikan perekonomian yaitu dengan menggabungkan kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan fiskal

dan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat sehingga dapat mempertahankan *fullemployment* dan menghindari inflasi maupun deflasi. Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilkan perekonomian, seperti terjadi deflasi, inflasi, penurunan permintaan/penawaran suatu barang yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah yang lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi, dll.

Permasalahannya sekarang ialah bagaimana menyelaraskan seluruh kebijaksanaan yang akan diterapkan jika terjadi suatu masalah, tanpa bertentangan dengan kebijaksanaan yang lain dan tanpa menimbulkan masalah baru. Baik itu kebijaksanaan dalam rangka peranan pemerintah sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi agar efisien, distribusi pendapatan agar merata dan adil serta stabilitas ekonomi. Demikian juga halnya kebijakan dibidang bidang lain.

Pada bidang kelautan peran stabilisasi membantu masyarakat dalam memanfaatkan laut Indonesia. Fungsi stabilisasi di sini ditujukan agar kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan social ekonomi masyarakat. Jadi peran stabilisasi pemerintah dibutuhkan karena membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan agar pengelolaan kelautan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Oleh karena itu peran stabilisasi berperan penting dalam membuat kebijakan agar potensi laut Indonesia dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga keberlangsungan sumber daya laut dapat dijaga dengan baik.

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada dasarnya penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan pemerintah.
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
3. Penerimaan dari hasil – hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang beraal dari pengenaan denda administrasi.
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri.

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan undang - undang jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai di atas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai di atas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. (BPKP, 2014)

7. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, financial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Lasswell (1970), kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*).

Anderson (1994), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive course of problem or matter of concern*).

Sementara itu pakar kebijakan public mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, di sinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Dye, 1978)

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai publik aktor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa

untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Aminullah 2004), bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas – batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat (Ndraha, 2003).

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybemology adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan, Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan antara lain, model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model incremental, model teori permainan, model pilihan publik, dan model sistem. Selanjutnya tercatat tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye, yaitu model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis.

Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan (Abidin, 2004) :

- a. Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

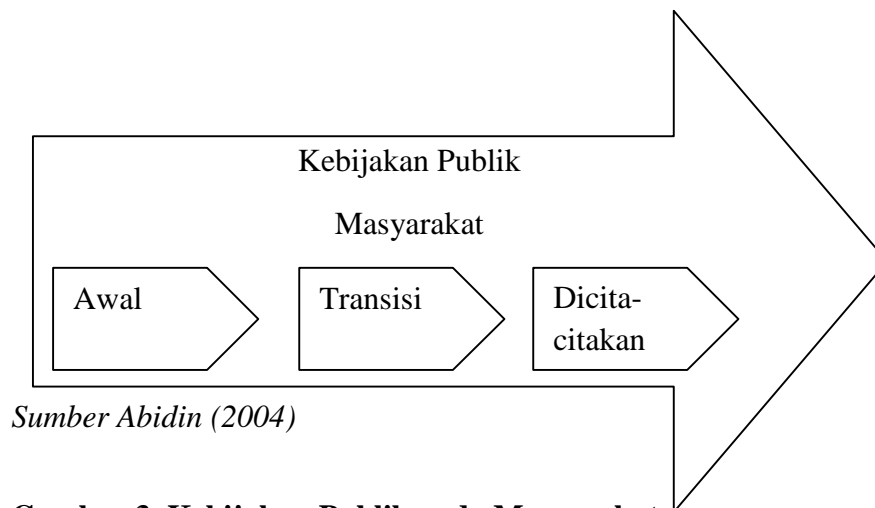
- b. Kebijakan pelaksanaan yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat peraturan pemerintah tentang pelaksanaan satu undang – undang.
- c. Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan (Dunn, 2003). Analisis kebijakan dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukan pengujian secara empiris dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan situasi tertentu (Hill, 1993).

Di sisi lain, kebijakan publik sangat terkait dengan administrasi negara ketika publik aktor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal administrasi negara. Kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu atau kelompoknya, melainkan diperlukan keterlibatan pihak lain yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Pihak lain inilah yang kemudian disebut dengan administrasi negara.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan .

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku “Understanding Public Policy”, yang dikutip oleh Nugroho (2008), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kebijakan bersama tampil. Begitu pula menurut Abidin (2004), kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan – keputusan khusus di bawahnya. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Hal ini seperti tergambar dalam Gambar berikut :



Sumber Abidin (2004)

Gambar 3. Kebijakan Publik pada Masyarakat

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Kebijakan mudah publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik (Nugroho, 2008).

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho, 2008).

Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan masalah salah satu di antara berbagai kebijakan:

1. Efektifitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
2. Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang tercapai.
3. Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
4. Adil.
5. Terjawab – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Aktivitas analisis di dalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap para serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu di dalam kebijakan publik akan terlihat suatu gambaran bersintesa berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, maka akan terintegrasi

antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama – sama. Di dalam proses kebijakan telah termasuk di dalamnya berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama – sama.

Pada praktik kebijakan publik antara lain mengembangkan mekanisme jaringan aktor (*actor networks*). Melalui mekanisme jaringan aktor telah tercipta jalur – jalur yang bersifat informal (*second track*), yang ternyata cukup bermakna dalam mengatasi persoalan – persoalan yang sukar untuk dipecahkan. Mark Considine member batasan jaringan aktor sebagai keterhubungan secara tidak resmi dan semi resmi antara individu – individu dan kelompok – kelompok di dalam suatu system kebijakan. Terdapat tiga rangkaian kesatuan penting di dalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

8. Konsep Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang seringkali mencampuradukan kedua kata tersebut. Menurut Karl Von Clausewitz (2006), strategi adalah pengetahuan

tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Sedangkan menurut Stephanie K. Marus, strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

9. Konsep Dasar Kelautan

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang, sedangkan kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau secara historis dianggap demikian. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan sumber daya laut, baik yang dapat diperbahurui maupun yang tidak dapat diperbahurui yang memiliki keunggulan

komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sementara pengelolaan kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi (UU No 32 Tahun 2014).

10. Konsep Pembangunan Kelautan

Pembangunan kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Pembangunan nasional diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan :

- Pengelolaan sumber daya kelautan
- Pengembangan sumberdaya manusia
- Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut
- Tata kelola dan kelembagaan
- Peningkatan kesejahteraan
- Ekonomi kelautan
- Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut
- Budaya bahari

Proses penyusunan kebijakan pembangunan kelautan dilaksanakan sebagai berikut :

- Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan terpadu jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan terpadu jangka menengah dan jangka pendek
- Kebijakan pembangunan kelautan dijabarkan ke dalam program setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan.

11. Metode Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan maupun pemangku kebijakan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*), dan peluang (*Opportunities*), namun secara kebersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*), dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, dan strategis perusahaan maupun pemangku kebijakan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT memiliki beberapa keuntungan antara lain :

- Tidak hanya dapat membuat ekstrapolasi masa depan, analisis SWOT dapat dipakai untuk membuat masa depan.
- Dapat dipakai membangun untuk konsensus berdasarkan kebutuhan dan keinginan.
- Cocok dengan teknik lain antara lain *Time Series* maupun AHP.
- Bersifat multiguna dan sederhana.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan metode penelitian yang sangat berguna untuk menjadi acuan dalam menganalisis strategi dan kebijakan sehingga dihasilkan strategi dan prioritas yang terbaik dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Lampung.

Tabel 6. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Joice Betsy Mahura, Eko Sri Wiyono ² , Daniel R. Monintja(2010)	Analisis kebijakan pengembangan wisata bahari (kasus pulau tagalaya dan pulau kumo di kabupaten halmahera Utara)	Skala prioritas strategi kebijakan untuk pengembangan wisata bahari di Pulau Tagalaya dan Pulau Kumo kabupaten Halmahera Utara berdasarkan analisis SWOT dan AHP adalah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prioritas 1 : Peningkatan infrastruktur wisata bahari, ▪ Prioritas 2 : Pengelolaan wisata bahari berbasis masyarakat, ▪ Prioritas 3 : Promosi dan publikasi objek wisata, ▪ Prioritas 4 : Peningkatkan kerjasama antar sektor terkait, ▪ Prioritas 5 : Pembinaan dan pelatihan wisata bahari, ▪ Prioritas 6 : Peningkatan stabilitas keamanan wilayah, ▪ Prioritas 7 : Pembagian zonasi pemanfaatan perikanan dan pariwisata

2	Hazmi Arief, Novia Dewi dan Jumatri Yusri (2014)	Kebijakan pengembangan usaha perikanan tangkap Kota Dumai provinsi Riau	Peningkatan optimal produksi sumberdaya perikanan dengan memperhatikan faktor keberlanjutan melalui penyediaan sarana dan fasilitas perikanan yang kondusif dalam rangka meningkatkan partisipasi dan sinergisitas <i>stakeholder</i> untuk mencapai kesejahteraan. Arah kebijakan adalah; kebijakan pengaturan <i>total allowable effort</i> , kebijakan pengembangan berbasis penguatan teknologi perikanan, kebijakan pengembangan pasca panen, kebijakan pengembangan mutu dan kualitas sumberdaya manusia perikanan, kebijakan pengelolaan secara terpadu terutama yang erat kaitannya dengan konsep <i>minapolitan</i> Kota Dumai
3	Rizky Alfira (2014)	Identifikasi Potensi Dan Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Pada Kawasan Suaka Margasatwa Mampie Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar	Strategi pengembangan ekowisata mangrove pada Kawasan Suaka Margasatwa Mampie di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yaitu : peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui sosialisasi terkait aspek wisata, penanaman jenis mangrove penahan abrasi secara berkelanjutan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata, dan kerjasama yang baik antar pemangku kebijakan
4	Siti Rohana Nasution	Proses Hirarki Analitik Dengan <i>Expert Choise 2000</i> Untuk Menentukan Fasilitas Pendidikan Yang Diinginkan	Kesatuan (<i>Unity</i>) Proses Hirarki Analitik memberikan model yang tunggal, mudah dimengerti, fleksibel untuk masalah yang luas dan tidak terstruktur. 2. Kompleksitas (<i>Complexity</i>) Proses Hirarki Analitik mengintegrasikan pendekatan

		Konsumen	deduktif dan sistem dalam memecahkan masalah kompleks. 3. Ketergantungan (<i>Interdependence</i>) Proses Hirarki Analitik berhubungan dengan interdependence dari elemen-elemen sistem dan tidak berdasarkan berpikir linear. 4. Penyusunan Hirarki (<i>Hierarchic Structuring</i>) Proses Hirarki Analitik merefleksikan kecenderungan natural pikiran untuk menyusun elemen-elemen sistem ke dalam level yang berbeda dan mengelompokkan elemen-elemen yang sama pada setiap level.
5	Moch. Salim (2010)	Dinamika Kebijakan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang Pada Masa Reformasi Dan Otonomi Daerah Tahun 1998 - 2008	Paradoks pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia menjadi fenomena nasional sejak zaman pascakemerdekaan hingga Orde Baru. Indonesia sebagai negara kepulauan (<i>archipelagic state</i>) yang mempunyai potensi maritim yang begitu besar belum mampu menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor terdepan dan penggerak utama perekonomian nasional. Hal tersebut juga dialami oleh Kabupaten Rembang yang secara historis mewarisi kultur maritim dan mempunyai kawasan pesisir yang relatif dominan namun belum berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

III. METODE PENELITIAN

A. Langkah Penggunaan Model

Langkah pertama diawali dengan analisis faktor internal dan eksternal. Kemudian dilakukan pendekatan analisis SWOT dengan interaksi matriks IFAS-EFAS untuk memperoleh beberapa alternatif strategi yang paling sesuai menurut skala prioritasnya. Hasil analisis SWOT dengan matriks IFAS-EFAS inilah yang akan menjadi rekomendasi alternatif strategi kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

B. ANALISIS SWOT

1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal

Tahap pertama dalam analisis SWOT adalah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang dianggap berpengaruh secara positif maupun secara negatif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Identifikasi diperoleh dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Tahap ini sangat penting karena hasil dari identifikasi ini akan menjadi dasar untuk kegiatan analisis berikutnya. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal ini dilakukan

dengan mempelajari LAKIP dan Renstra maupun melakukan wawancara di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

2. Penyusunan Kuisisioner

Responden yang diminta untuk melakukan penilaian faktor-faktor internal dan eksternal dalam kuisisioner SWOT berasal dari pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang berasal dari :

- Bidang Kelautan Pesisir P2K dan Pengawasan SKDP
- Bidang Perikanan Budidaya
- Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
- Bidang Perikanan Tangkap

Jumlah total responden yang melakukan penilaian kuisisioner sebanyak 10 responden, yang apabila dilihat dari segi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- ❖ Pendidikan S2 : 2 responden
- ❖ Pendidikan S1 : 7 responden
- ❖ Pendidikan D3 : 1 responden

Dari ke-10 responden tersebut, terdiri dari 4 responden pria dan 6 responden wanita.

3. Penentuan Bobot

Setelah faktor-faktor internal dan eksternal diperoleh, kemudian disusun sebuah kuisisioner sebagai sarana untuk mendapatkan penilaian dari responden terhadap

faktor-faktor yang telah dirumuskan. Penilaian pada tahap ini diberikan skala antara 1 sampai dengan 9, yang mempunyai arti sebagai berikut :

a. Penilaian terhadap prestasi faktor.

- ❖ Skala 1 berarti amat sangat buruk
- ❖ Skala 2 berarti sangat buruk
- ❖ Skala 3 berarti buruk
- ❖ Skala 4 berarti sedikit buruk
- ❖ Skala 5 berarti sedang atau netral
- ❖ Skala 6 berarti sedikit baik
- ❖ Skala 7 berarti sangat baik
- ❖ Skala 9 berarti amat sangat baik

b. Penilaian urgensi (tingkat kepentingan) terhadap penanganan faktor-faktor.

Penilaian pada tahap ini diberikan skala a sampai dengan d, yang mempunyai arti sebagai berikut :

- ❖ Skala a berarti sangat penting untuk dilakukan penanganan
- ❖ Skala b berarti penting untuk dilakukan penanganan
- ❖ Skala c berarti kurang penting untuk dilakukan penanganan
- ❖ Skala d berarti tidak penting untuk dilakukan penanganan

Setelah faktor-faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan dan faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman langkah

selanjutnya melakukan pembobotan IFAS-EFAS elemen-elemen SWOT dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Setiap nilai rata-rata horizontal dikurangi nilai 5 sebagai nilai dari persepsi responden yang lebih adil atas pembagian internal menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal menjadi peluang dan ancaman. Nilai 5 diambil sebagai patokan (*benchmark*) yang berkorelasi netral terhadap sasaran. Nilai yang dihasilkan kemudian disebut penyesuaian nilai rata-rata.
- ❖ Nilai penyesuaian bersifat mutlak.
- ❖ Penentuan bobot dari masing-masing elemen SWOT untuk setiap faktornya dengan mengambil bobot masing-masing faktor = 100%. Bobot total dari setiap elemen SWOT menggambarkan total nilai penyesuaian rata-rata terhadap nilai total faktornya masing-masing.
- ❖ Pembobotan yang dipakai sebagai bahan penilaian prioritas adalah bobot tertimbang yang diperoleh dari perkalian antara bobot x rating. Rating diperoleh dari nilai urgensi skala prioritas kepentingan, sesuai dengan urutan level, huruf a= 4, b= 3, c= 2, d= 1.

4. Perumusan Strategi

Untuk mendapatkan prioritas dan keterkaitan antar strategi, maka dari hasil pembobotan IFAS-EFAS kuisisioner SWOT untuk masing-masing indikator tersebut, dilakukan interaksi kombinasi dari strategi yang meliputi kombinasi internal dan eksternal yang terdiri dari :

1. Strategi *Strength-Opportunity* (SO); Interaksi kombinasi strategi SO: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi *Strength-Threat* (ST); Interaksi kombinasi strategi ST: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO); Interaksi kombinasi strategi WO: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
4. Strategi *Weakness-Threat* (WT) Interaksi kombinasi strategi WT: yaitusuatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Tabel 7. Matriks Faktor Internal dan Eksternal

		FAKTOR EKSTERNAL	
		OPPORTUNITY (O)	THREAT (T)
FAKTOR INTERNAL	STRENGTH (S)	Strategi SO	Strategi ST
	WEAKNESS (W)	Strategi WO	Strategi ST

Sumber : Nining I. Soesilo, 2002

Dari matriks tersebut akan diperoleh 4 pilihan strategi yang dapat diambil oleh *decision maker* sebagai pilihan yang tentu saja ditentukan setelah mempertimbangkan potensi, kondisi dan kendala yang ada. Kemudian dari interaksi strategi tersebut akan didapatkan matriks SWOT interaksi IFAS-EFAS.

Tabel 8. Matriks SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan <i>(Strengths)</i>	Kelemahan <i>(Weakness)</i>
Peluang <i>(Opportunities)</i>	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Ancaman <i>(Threats)</i>	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti, 2005

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini :

1. Kekuatan di Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung
 - a. Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar
 - b. Adanya legislasi dan regulasi kelautan dan perikanan
 - c. Posisi geografis yang strategis
 - d. Adanya kelembagaan dan kemitraan
 - e. Pengelolaan pesisir P2K
 - f. Adanya dukungan dana rutin (APBN dan APBD)
2. Kelemahan di Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung
 - a. Terbatasnya sarana, prasarana
 - b. terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
 - c. terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum
 - d. lemahnya kelembagaan dan usaha kecil
 - e. lemahnya data informasi dan akses pasar
 - f. lemahnya produk kelautan perikanan eksisting

3. Faktor peluang utama yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah :

- a. Berkembangnya teknologi dan informasi kelautan dan perikanan
- b. Meningkatnya permintaan produk perikanan
- c. Berlakunya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean
- d. Berkembangnya produk non konsumsi
- e. Meningkatnya kegiatan wisata

4. Faktor ancaman utama yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah :

- a. Cuaca ekstrem dan *climate change* yang berpengaruh pada pengelolaan perikanan tangkap maupun budidaya
- b. Hama dan penyakit yang menyerang budidaya perikanan
- c. *Illegal Fishing* atau masih adanya praktek-praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang tidak bertanggung jawab
- d. Penggunaan bahan makanan, obat, bahan kimia berbahaya
- e. Pencemaran dan degradasi lahan
- f. Adanya konflik kepentingan

5. Strategi Kebijakan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung

1. Meningkatnya optimalisasi produksi perikanan
2. Memperluas akses pasar lokal dan ekspor
3. Meningkatkan konsumsi ikan
4. Mengembangkan diversifikasi dan nilai tambah produk perikanan

5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan kelautan dan perikanan dan kemitraan
6. Mengembangkan intervensi dalam menghadapi *Climate Change* dan mitigasi bencana
7. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir P2K

B. Saran

Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Hendaknya pemerintah memberikan bantuan kepada nelayan teknologi yang berperan penting di mana letak banyaknya ikan tangkapan. Serta meningkatkan tingkat konsumsi ikan di Lampung agar bisa tumbuh di atas rata-rata nasional. Kemudian memberikan pembekalan dan pendampingan bagi kelompok-kelompok nelayan maupun budidaya agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berkembang kearah yang lebih baik. Dan juga memberikan informasi yang akurat tentang kondisi cuaca.
2. Pemerintah hendaknya memperbanyak penelitian, rekayasa melalui teknologi sehingga menghasilkan varietas unggul dalam budidaya perikanan dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Kemudian memperbesar peran masyarakat dalam menjaga kelestarian pesisir dan pulau melalui sadar wisata dan desa wisata. Begitu pula SDM di lingkungan Dinas

Kelautan dan Perikanan perlu ditingkatkan untuk memberikan wawasan luas di bidang inovasi maupun teknologi kelautan.

3. Pemerintah berperan penting dalam membuat UU dalam memaksimalkan hasil laut, dan juga aturan-aturan dalam menjaga hasil laut sehingga dalam pengelolaan hasil laut tidak merusak lingkungan. Kemudian dalam pengelolaan hasil laut hendaknya pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan mutu dan produk hasil laut. Karena hasil laut nelayan Lampung masih ada menggunakan cara tradisional dalam menyimpan hasil tangkapan, sehingga mutu produk mengalami kehilangan karena media penyimpanan yang bermutu rendah. Maka untuk mutu dengan hasil baik hendaknya pemerintah memberikan bantuan dengan cara sistem rantai dingin atau Cold Chain System (CCS) yaitu penanganan ikan dengan suhu 0⁰
- C. Sehingga mutu produk dapat terjamin dengan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- _____2013. *Pemanfaatan Sumber Daya Laut Guna Meningkatkan Perekonomian Rakyat dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional*. Jurnal Lemhanas Nasional.
- _____2013. *Dasar – Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Kementerian Keuangan RI. Jakarta
- _____2014. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta.
- _____2014. *Badan Pusat Statistik*. Lampung.
- _____2014. *Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung*. Lampung.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.
- Aminulla. 2004. *Berpikir Sistemik untuk Pembuatan Kebijakan Publik Bisnis dan Ekonomi*. PPM Jakarta.
- Clausewitz, Carl Von. 2006. *On War – Volume I*. Republished by Bebook.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjadara University Press. Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall N J. Englewood Cliffs.
- Hill, Michael. 1993. *The Policy Process: A Reader*. New York. Harvester Wheatsheaf.
- Kusumastanto. T. 2014. *Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI*. Jurnal
- Lasswell, Harold D. 1970. *Power and Society*. New Heave. Yale University Press.
- Lasswell, Harold D. 1970. *A Riview of the Policy Sciences*. Elsevier. New York.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Munaf. D.R. 2013. *Kajian Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, Sektor Keamanan Laut*. Jurnal.

- Ndraha. 2003. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Pustaka Belajar
- Rangkuti, F, 1997. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Rasyid M. Ryaas. 2000. *Makna Pemerintah. Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Saaty, L. Thomas. 1986. *Decision Making For Leaders*. University of Pittsburgh;
- Salim. S. 2010. *Dinamika Kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Pada Masa Reformasi dan Otonomi Daerah Tahun 1998-2008*. Tesis
- Soesilo, I Nining. 2002. *Manajemen Stratejik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis), Buku II*. Universitas Indonesia.
- Tjokoamidjojo, Bintor. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.

Akses Internet

www. DepKeu.go.id.

www.bpkp.go.id.

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/08/14/potensi-kelautan-indonesia-mencapai-171-miliar-dollar-as>. Diakses bulan Januari

<http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1969507/ri-punya-potensi-besar-sektor-kelautan-perikanan>. Diakses bulan Januari

<http://www.antarasultra.com/print/274815/potensi-ekonomi-maritim-indonesia-sangat-besar>. Diakses bulan Januari

<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/03/25/peranan-pemerintah-dalam-perekonomian-448992.html>. Diakses bulan Februari

<http://www.antaraneews.com/berita/457709/sdm-berbasis-iptek--katalisator-pertumbuhan-ekonomi-kelautan>. Diakses bulan February

<https://rokhmindahuri.wordpress.com/tag/transportasi-laut/>. Diakses bulan Maret
<http://www.antaraneews.com/berita/450134/indonesia-perlu-regulasi-untuk-kelola-sumber-daya-kelautan>. Diakses bulan Maret

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/21/021900226/Catatan.untuk.Visi.Kemaritiman.Jokowi-JK?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&. Diakses bulan April

<https://ariasusmono94.wordpress.com/2015/01/15/pemanfaatan-perikanan-di-indonesia/>. Diakses bulan Mei

<http://wartaekonomi.co.id/berita35446/inilah-permasalahan-sektor-kelautan-dan-perikanan-hasil-kajian-kadin.html>. Diakses bulan Mei

<http://www.coreindonesia.org/view/91/cmd-12-sektor-kelautan-di-era-pemerintahan-baru-mengurai-masalah-dengan-paradigma-baru.html>.
Diakses bulan Juni

<http://laurafricilia.blogspot.com/2011/10/peran-dan-fungsi-pemerintah.html>.
Diakses bulan Juni

<http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan.html>. Diakses
bulan Juni